

**PENGEMBANGAN SISTEM DAN PROSEDUR PENCATATAN DAN
PELAPORAN AKUNTANSI PEMERINTAH BAGI SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Mengacu Pada Permendagri No.59/2007**

Dini Rosdini¹, Hamzah Ritchi, Zaldy Adrianto

ABSTRACT

This research aims to reveal the system and procedures of accounting and reporting the financial statements of Tasikmalaya Regency Government, furthermore the authors develop the system and procedure of accounting and financial reporting that apply with the Ministry of Internal Affairs Decree No. 59 year 2007.

This research method used analytical descriptive, and the researchers collected data by field research and literature study, particularly the Ministry of Internal Affairs Decree No. 13 year 2006 and its amendment (the Ministry of Internal Affairs Decree No. 59 year 2007).

The result of survey and interview in Financial Departement of Tasikmalaya Regency Government is that SKPKD in Tasikmalaya Regency Government didn't fully implement the Ministry of Internal Affairs Decree No. 59 year 2007. The researchers suggest that Tasikmalaya Regency Government should implement accounting and reporting system and procedures of income accounting, spending accounting, budget realization, balance sheet, cash flow statements, and its financial notes.

PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya proses globalisasi sosial budaya, politik, ekonomi, dan informasi yang berlangsung dengan cepat di Indonesia juga adanya reformasi sosial, politik, ekonomi, dan manajemen yang berlangsung cepat hampir satu dekade ini, memberi arah baru dan sekaligus tekanan pada pemerintah untuk memulai kebijakan desentralisasi secara efektif.

Dalam reformasi manajemen pemerintahan yang perlu diantisipasi Pemerintah Daerah adalah bagaimana menyiapkan masterplan sistem

¹ Peneliti Department Akuntansi FEB Universitas Padjadjaran

manajemen pemerintah yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin akurasi, efisiensi, dan efektivitas dalam mekanisme pengelolaan keuangan pemda diperlukan bantuan teknologi informasi.

Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu daerah yang sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan di berbagai aspek terutama aspek ekonomi dan pemerintahan, dengan potensi daerah yaitu: agribisnis, pariwisata, kelautan, pertambangan dan UKM. Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah "mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih", dan untuk salah satu upaya untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menciptakan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

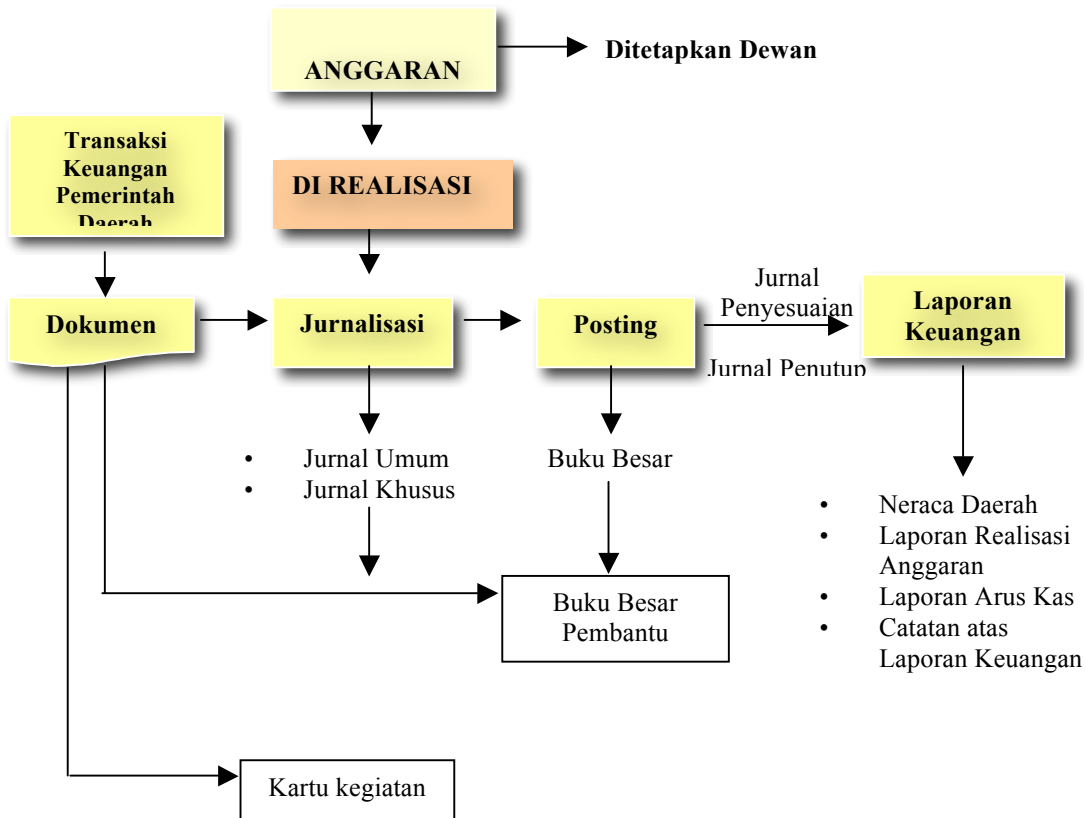
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi APBD berkepentingan untuk membuat suatu sistem yang terintegrasi berkaitan dengan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan sampai ke tingkat satuan kerja. Karena berdasarkan PP 58 tahun 2005 dan Permendagri 59/2007 (perubahan dari Permendagri 13/2006) satuan kerja diharuskan menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Agar pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan ini berhasil, sumberdaya manusia harus dipersiapkan dan sistem akuntansi keuangan daerah harus dirancang sesuai kebutuhan pemda, termasuk sistem untuk satuan kerja perangkat daerah. Karena berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007, satuan kerja di pemda harus membuat laporan keuangan satuan kerja yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti

transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output*-nya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu.

Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Apabila digambarkan sebagai berikut:



STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 (tiga) hal, yaitu Pertama, masalah pengakuan. Pertanyaannya kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat. Kedua, masalah pengukuran. Pertanyaannya bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan. Ketiga, masalah pengungkapan (*disclosure*).

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Pengungkapan (*Disclosure*) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

METODE PENELITIAN DAN OBJEK PENELITIAN

Metode Penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif dan simulasi. Sama halnya dengan penelitian empiris, pengumpulan data juga digunakan. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh informasi yang tepat dalam mengembangkan sistem dan prosedur.

Objek penelitian karena berdasarkan observasi, maka objek penelitian yang dilakukan adalah Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

SISTEM DAN PROSEDUR PENCATATAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI YANG SEKARANG BERLAKU DI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan pada bulan Juni 2008, diperoleh informasi bahwa sistem dan prosedur pencatatan dan pelaporan akuntansi

SKPKD belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 59 tahun 2007, SKPKD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih menerapkan Kepmendagri No 29 Tahun 2003. Selain itu, proses akuntansi SKPD pun masih dilakukan oleh aparat di SKPKD, artinya SKPD belum mandiri dan SKPKD belum menjalankan fungsi optimal yang semestinya, seperti yang terdapat di dalam Permendagri No. 59 tahun 2007.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan output akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat SKPD dan di tingkat PPKD. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Adapun komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b) Neraca;
- c) Laporan Arus Kas; dan
- d) Catatan Atas Laporan Keuangan.

KONVERSI LAPORAN KEUANGAN PPKD

Laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD di sini menggunakan struktur akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005). Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah langkah konversi. Berikut bagan konversi yang dimaksud.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah		A. Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah		1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah		2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
B. Dana Perimbangan		B. Pendapatan Transfer
1. Dana Bagi Hasil :		Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
- Dana Bagi Hasil Pajak	→	▶1. Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	→	▶2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
2. Dana Alokasi Umum	→	▶3. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus	→	▶4. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1. Pendapatan Hibah	→	1. Dana Otonomi Khusus
2. Dana Darurat	→	2. Dana Penyesuaian
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	→	Transfer Pemerintah Provinsi
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	→	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	→	▶2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
		C. Lain-lain Pendapatan yang Sah
		1. Pendapatan Hibah
		2. Pendapatan Dana Darurat
		3. Pendapatan Lainnya

Sedangkan untuk belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di bawah harus dilakukan konversi.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung		A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai		1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga	→	▶2. Belanja Barang
3. Belanja Subsidi	→	3. Bunga
4. Belanja Hibah	→	▶4. Subsidi
5. Belanja Bantuan Sosial	→	5. Hibah
6. Belanja Bagi Hasil	→	6. Bantuan Sosial
7. Belanja Bantuan Keuangan	→	B. Belanja Modal
8. Belanja Tidak Terduga	→	1. Belanja Tanah
B. Belanja Langsung		2. Belanja Peralatan dan Mesin
1. Belanja Pegawai	→	3. Belanja Gedung dan Bangunan
2. Belanja Barang dan Jasa	→	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
3. Belanja Modal	→	5. Belanja Aset Tetap Lainnya
		6. Belanja Aset Lainnya
		C. Belanja Tak Terduga
		1. Belanja Tak Terduga
		D. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa
		1. Bagi Hasil Pajak

		2. Bagi Hasil Retribusi
		3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

STANDAR JURNAL TRANSAKSI PENDAPATAN

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan di PPKD :

No	Transaksi	Standar jurnal
1	Penerimaan pendapatan Dana perimbangan	Dr. Kas di Kasda/Bank xx Cr. Pendapatan dana perimbangan xx
2	Penerimaan pendapatan Lain-lain yang sah	Dr. Kas di Kasda/Bank xx Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah.. xx

Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (*recurring*) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya, dan juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan. PPK-PPKD berdasarkan informasi transfer kas dari BUD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Pengembalian kelebihan Pendapatan Satker yang dicatat oleh PPK-PPKD	Dr. RK-SKPD xx Cr. Kas di Kas Daerah xx
---	--

Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (*non recurring*) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, Satuan Kerja tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai berikut :

Pengembalian kelebihan Pendapatan, bersifat tidak berulang (<i>non recurring</i>)	Dr. SiLPA xx Cr. Kas di Kas Daerah xx
---	--

STANDAR JURNAL TRANSAKSI BELANJA

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di PPKD :

No	Transaksi	Standar jurnal
1	Belanja operasi (belanja tidak langsung), dengan SP2D UP/GU/TU	Dr. Belanja xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx

2	Belanja operasi (belanja tidak langsung), dengan SP2D LS	Dr. Belanja xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx
3	Belanja modal (belanja langsung) dengan SP2D UP/GU/TU	Dr. Belanja modal xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx
4	Belanja modal (belanja langsung) dengan SP2D LS	Dr. Belanja modal xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx
	Pengakuan aset atas belanja modal PPKD	Dr. Aset tetap xx Cr. Ekuitas Dana Investasi – Aset tetap xx (jurnal <i>corollary</i> dari belanja modal)
5	Belanja tidak terduga dengan SP2D UP/GU/TU	Dr. Belanja xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx
6	Belanja tidak terduga dengan SP2D LS	Dr. Belanja xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx
7	Belanja transfer dengan SP2D UP/GU/TU	Dr. Belanja xx Cr. Kas di Kasda/ Bank xx
8	Belanja transfer dengan SP2D LS	Dr. Belanja xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx

Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, PPK-PPKD mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang pemotongannya dilakukan oleh PPKD.

Standar jurnal nya adalah sebagai berikut :

9	Potongan Pajak/Taperum/IWP Satker yang dicatat oleh PPK-PPKD	Dr. Kas di Kasda/Bank xx Cr. Hutang Pajak PFK xx Cr. Hutang Taperum PFK xx Cr. Hutang IWP PFK xx
---	--	---

Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-PPKD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-PPKD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Hutang, dengan jurnal sebagai berikut :

10	Penerimaan Potongan Pajak di PPKD	Dr. Kas di Kasda/Bank xx Cr. Hutang Pajak xx
11	Pelunasan Pajak	Dr. Hutang Pajak xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja di catat sebagai pengurang belanja. PPK-PPKD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

12	Pengembalian kelebihan belanja	Dr. Kas di Kasda/Bank xx Cr. Belanja xx
----	--------------------------------	--

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya, maka PPKD mencatat jurnal sebagai berikut :

13	Pengembalian kelebihan Belanja, diterima pada periode berikutnya	Dr. Kas di Kasda/Bank xx Cr. Pendapatan lain-lain xx
----	--	---

STANDAR JURNAL TRANSAKSI PEMBIAYAAN PENERIMAAN

Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis.

Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal *corollary*, dimana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.

Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut :

Penggunaan SiLPA	1	No entry
	2	-

Pencairan dana cadangan	1	Dr. Kas di Kasda/Bank xx Cr. Pembiayaan penerimaan – Dana Cadangan xx
	2	Dr. Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam dana cadangan xx Cr. Dana cadangan xx

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	1	Dr. Kas di Kasda/Bank..... xx Cr. Pembiayaan penerimaan – Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan xx
	2	Dr. Ekuitas dana investasi-Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang xx Cr. Penyertaan modal pemerintah daerah/ Investasi xx

Penerimaan pinjaman daerah (contoh dari dalam)	1	Dr. Kas di Kasda/Bank xx Cr. Pembiayaan penerimaan – Penerimaan pinjaman daerah xx
--	---	---

negeri – perbankan)	2	Dr. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang xx Cr. Utang Dalam Negeri xx
---------------------	---	--

Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1	Dr. Kas di Kasda/Bank xx Cr. Penerimaan pembiayaan – Penerimaan kembali pemberian pinjaman xx
	2	Dr. Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang ... xx Cr. Bagian lancar pinjaman xx

Penerimaan piutang daerah	1	Dr. Kas di Kasda/Bank xx Cr. Pembiayaan penerimaan – Penerimaan piutang daerah xx
	2	Dr. Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang ... xx Cr. Piutang xx

STANDAR JURNAL TRANSAKSI PEMBIAYAAN PENGELUARAN

Penjurnalan transaksi pembiayaan pengeluaran dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis. Jurnal untuk transaksi pembiayaan pengeluaran merupakan jurnal *corollary*, dimana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.

Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut :

Pengisian dana cadangan	1	Dr. Pengeluaran pembiayaan – Pengisian Dana Cadangan xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx
	2	Dr. Dana cadangan xx Cr. Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam dana cadangan xx

Penyertaan modal pemerintah daerah	1	Dr. Pengeluaran pembiayaan – Penyertaan Modal daerah xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx
	2	Dr. Penyertaan modal pemerintah daerah ... xx Cr. Ekuitas dana investasi-Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang xx

Pembayaran pokok pinjaman (contoh pembayaran utang dalam negeri – perbankan)	1	Dr. Pembiayaan pengeluaran – Pembayaran pokok pinjaman xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx
	2	Dr. Bagian lancar utang jangka panjang dalam Negeri xx Cr. Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran utang jangka pendek xx

Pemberian pinjaman daerah	1	Dr. Pembiayaan pengeluaran – Pemberian Pinjaman xx Cr. Kas di Kasda/Bank xx
	2	Dr. Piutang xx Cr. Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang ...xx

STANDAR JURNAL TRANSAKSI NON KAS

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi selain kas di PPKD :

No.	Transaksi	Standar Jurnal
1	Koreksi kesalahan pencatatan (contoh: seharusnya belanja ATK, salah dicatat ke belanja dokumen)	Dr. Belanja ATK xx Cr. Belanja Dokumen xx
2	Pengakuan depresiasi atas aset tetap	Dr. EDI – Diinvestasi pada Aset Tetap ... xx Cr. Akumulasi depresiasi xx

KESIMPULAN

1. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Taasikmalaya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalm Negeri No 59/2007.
2. Sistem dan prosedur yang dikembangkan terdiri dari pengidentifikasian transaksi yang terjadi di SKPKD, yaitu transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan dan transaksi non kas. Setelah transaksi teridentifikasi, kemudian dimulai tahap awal dari siklus akuntansi yaitu penjurnalan, yang dilanjutkan ke dalam pemindahan (posting) ke Buku Besar, penyusunan Neraca Saldo, pencatatan jurnal penyesuaian, dan penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengembangan sistem dan prosedur ini dapat dilihat dalam flowchart.

3. Standar Jurnal yang kami susun untuk setiap transaksi di SKPKD, kami golongan sebagai standar jurnal untuk transaksi pendapatan, transaksi belanja, transaksi pembiayaan, transaksi non kas, dan standar jurnal penyesuaian yang dilakukan di akhir periode.

DAFTAR PUSTAKA

- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2006. *Intermediate Accounting, 12th Edition*, March. John Wiley & Sons, Inc.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Romney, Marshall B. and Steinbart, Paul J. 2006. *Accounting Information Systems, 10/e*. Prentice Hall Business Publishing.